

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

Sejak kelahirannya pada tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memegang peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas utama DPR mencakup penyusunan undang-undang (legislasi), pengelolaan dan pengawasan anggaran negara, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sejak era Reformasi 1998, fungsi pengawasan DPR semakin diperkuat melalui amandemen UUD 1945 dan transparansi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik.

Di antara berbagai komisi di DPR, Komisi VI memiliki perhatian khusus pada sektor perdagangan, industri, investasi, dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peran ini juga mencakup tugas lebih lanjut seperti penegakan standarisasi produk dan perlindungan konsumen. Dalam era transformasi digital, Komisi VI turut mendorong digitalisasi BUMN dan regulasi layanan *e-commerce* guna memastikan praktik ekonomi yang adil dan transparan. Ini menjadi sangat penting mengingat semakin maraknya transaksi digital dan kebutuhan perlindungan publik secara luas.

Seiring perkembangan tersebut, strategi komunikasi publik lembaga seperti DPR menjadi semakin kompleks. Tidak cukup hanya bergantung pada media massa tradisional yang sudah mulai berubah menjadi komunikasi digital dan keterlibatan langsung lewat kunjungan lapangan menjadi elemen kunci dalam memperkuat kepercayaan publik. Penelitian seperti oleh Agustini et al. (2024) membahas bagaimana lembaga pemerintah

memanfaatkan platform digital untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif. Artikel lainnya, Amri Dunan (2020), menjelaskan pentingnya pemerintahan yang terbuka melalui pemanfaatan media digital secara cermat. Sementara itu, Putri Y. A. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan akun media sosial secara resmi oleh pemerintah publik berperan penting dalam penyampaian informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penetrasi internet yang tinggi di Indonesia juga memperkuat relevansi komunikasi digital dalam ranah legislatif. Menurut APJII (2024), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221,56 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kini dapat diakses secara digital, membuka peluang komunikasi publik yang lebih luas sekaligus menimbulkan tantangan baru mengenai literasi dan kepercayaan informasi.

## **2.2 Visi Misi**

### **2.2.1 Visi**

Dilansir dari [pdiperjuangan.id](https://pdiperjuangan.id), visi Fraksi PDI Perjuangan DPR RI adalah mewujudkan amanat penderitaan rakyat sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar negara, serta mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

### **2.2.2 Misi**

Dilansir dari [pdiperjuangan.id](https://pdiperjuangan.id), adapun misi dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai berikut :

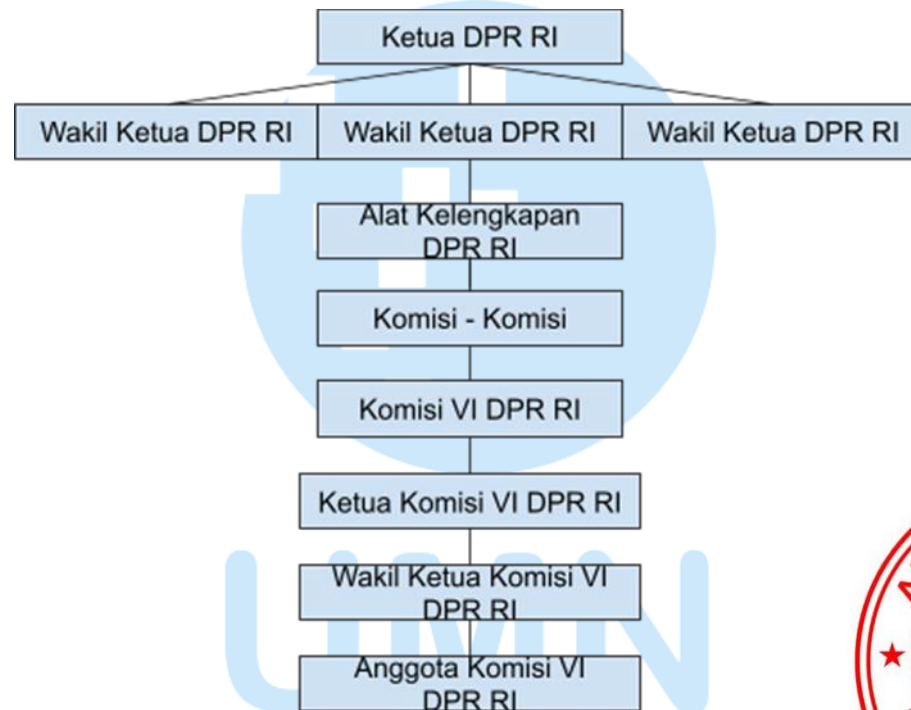
- 1) Mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- 2) Membangun masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan pro-rakyat.

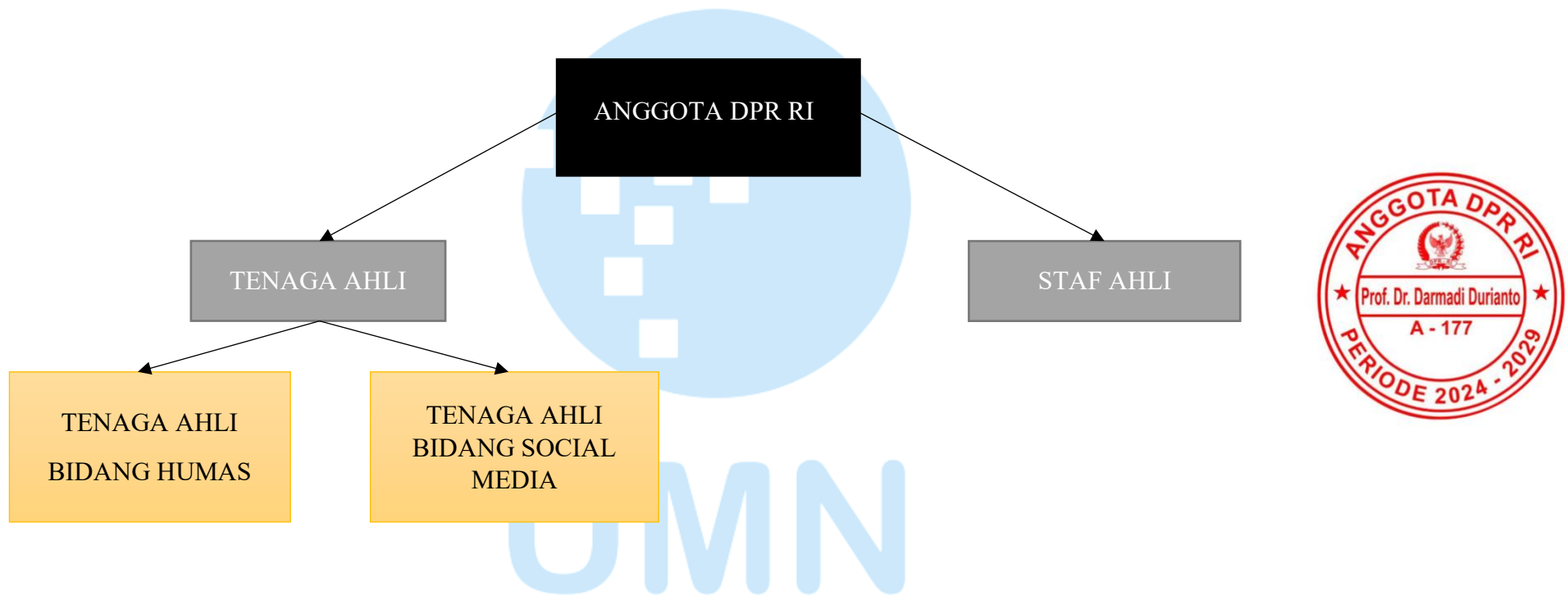
### **2.3 Struktur Organisasi Perusahaan**

DPR RI adalah lembaga legislatif dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Komisi VI DPR RI berfokus pada perdagangan, perindustrian, investasi, dan BUMN. Berikut struktur organisasi DPR RI dan Komisi VI DPR RI .





Gambar 2.1 Bagan DPR RI



Gambar 2.2 Bagan Susunan Staff A-177

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk memastikan tugasnya berjalan efektif, DPR RI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua DPR RI yang saat ini dijabat oleh Puan Maharani, serta dibantu oleh tiga Wakil Ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Di bawah kepemimpinan tersebut, terdapat alat kelengkapan DPR RI, termasuk komisi-komisi yang bertanggung jawab dalam berbagai bidang pemerintahan. Salah satu komisi yang memiliki peran strategis adalah Komisi VI DPR RI, yang menangani sektor perdagangan, perindustrian, investasi, dan pengelolaan BUMN.

Komisi VI ini dipimpin oleh Anggia Erma Rini sebagai Ketua Komisi VI DPR RI, dengan didampingi oleh empat Wakil Ketua, yaitu Adisatrya Suryo Sulisto, Nurdin Halid, Andre Rosiade, dan Eko Hendro Purnomo. Untuk menjalankan tugasnya secara efektif, Komisi VI DPR RI terbagi ke dalam beberapa subkomisi, yaitu Subkomisi Perdagangan & Perindustrian, Subkomisi Investasi, Subkomisi BUMN, serta Subkomisi Standarisasi & Konsumen, yang masing-masing bertanggung jawab dalam mengawasi dan merumuskan kebijakan sesuai dengan bidangnya.

Sebagai salah satu anggota Komisi VI DPR RI, Prof. Darmadi Durianto memiliki tim yang membantu dalam menjalankan tugasnya. Tim ini terdiri dari Tenaga Ahli (TA) serta Staf Administrasi (SA) yang bekerja sama untuk memastikan efektivitas kerja dalam mendukung fungsi legislatif dan komunikasi publik.

#### 1) Tenaga Ahli (TA)

Tenaga Ahli (TA) merupakan bagian penting dalam mendukung kinerja anggota DPR RI, khususnya di Komisi VI. Mereka tidak hanya bertugas melakukan analisis, riset kebijakan, dan penyusunan materi rapat, tetapi juga berperan sebagai penyusun strategi komunikasi publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta isu-isu ekonomi nasional yang sedang berkembang.

Dalam struktur internal Tenaga Ahli (TA) pada Anggota DPR RI Prof. Darmadi Durianto A-177, terdapat pembagian bidang kerja yang cukup spesifik, salah satunya adalah bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan bidang Konten Digital/Social Media.

- a) Bidang Humas berfokus pada komunikasi eksternal formal, seperti penyusunan siaran pers, penanganan hubungan dengan media, koordinasi peliputan, serta pendampingan kegiatan lapangan guna memastikan informasi tersampaikan secara efektif kepada publik. Dalam bidang ini, Bapak Dewantara, S.IP. menjadi salah satu figur penting yang bertanggung jawab terhadap strategi komunikasi berbasis media massa dan menjalin hubungan dengan jaringan wartawan. Pelaksanaan tugas di bidang Humas ini juga dibantu oleh staf magang, yaitu penulis, yang turut berperan dalam mendukung kegiatan operasional dan komunikasi publik bersama Tenaga Ahli Bidang Humas.

Adapun anggota tadi Tenaga Ahli (TA) dalam Bidang Humas yaitu :

- Venny Sufendi Dharmadi
- Haryanto

- b) Bidang Konten Digital/Sosial Media (*Content Creator*) bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengelola konten visual dan naratif yang akan disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Tim ini juga melakukan monitoring terhadap engagement publik serta mengelola personal branding digital anggota dewan. Salah satu tenaga ahli yang terlibat di bidang ini adalah Cannavaro Otniel Setiawan, yang secara aktif mengembangkan strategi visual, storytelling, serta produksi konten multimedia untuk memperkuat citra dan komunikasi politik digital dari Anggota DPR RI Prof. Darmadi Durianto A-177.

## 2) Staf Administrasi (SA)

Staf Administrasi bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen, jadwal, serta berbagai kebutuhan administratif yang mendukung kelancaran kerja Prof. Darmadi Durianto. Mereka berperan dalam mengatur agenda rapat, mengelola komunikasi internal dan eksternal, serta membantu dalam dokumentasi kerja legislatif.

Anggota Staf Administrasi dalam tim Prof. Darmadi Durianto adalah:

- a) Lisa Amalia
- b) Gianita Santika Sutrisno

